

Area Vakum &
Pengemasan

RENCANA KERJA

TAHUN 2026



**STASIUN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN PALEMBANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang (Stasiun PPMHKP Palembang) Tahun 2026 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyusunan Renja ini mengacu pada arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 yang menitikberatkan pada pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Dengan adanya dokumen ini diharapkan tercipta keselarasan antara proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi kinerja organisasi.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis, Stasiun PPMHKP Palembang berperan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, pelayanan sertifikasi, pengujian laboratorium, serta penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Melalui penerapan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC), dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar target kinerja organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Palembang, 07 Januari 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Palembang



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Yoyok Fibrianto, SE., S.Pi., M.Pi
Nip. 19740225 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	iii
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Sasaran.....	2
BAB II RENCANA STRATEGIS.....	3
2.1 Visi dan Misi.....	3
2.2 Tujuan Strategis.....	5
2.3 Arah Kebijakan dan Strategi.....	5
2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	6
2.4.1 Sasaran Strategis.....	6
2.4.2 Indikator Kinerja.....	8
2.4.3 Rencana Kinerja dan Anggaran Stasiun PPMHKP Palembang.....	10
BAB III PENUTUP.....	13

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.** Alokasi anggaran Stasiun Stasiun PPMHKP Palembang Palembang
perjenis Kegiatan..... 10
- Grafik 2.** Alokasi anggaran Stasiun KIPM Paelmbang per kegiatan dan per jenis
belanja..... 12

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, program, kegiatan, serta target kinerja dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara efektif, terarah, dan akuntabel. Penyusunan Renja Tahun 2026 mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

Renja Tahun 2026 disusun untuk mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang mengusung tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis sumber daya akuatik (blue food), mendorong transformasi ekonomi biru, meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Selain itu, penyusunan Renja juga merupakan implementasi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional serta Pasal 31 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Penyusunan Renja Tahun 2026 juga merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden dan Asta Cita, khususnya dalam upaya memperkuat swasembada pangan, pengembangan ekonomi biru, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan, penguatan hilirisasi produk kelautan dan perikanan, serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan, antara lain percepatan pembangunan pergaraman nasional, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan budi daya perikanan berkelanjutan, revitalisasi laboratorium jaminan mutu hasil

kelautan dan perikanan, serta penguatan pengawasan dan pengendalian mutu produk kelautan dan perikanan.

Dengan penyusunan Renja ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara terukur, terpadu, efektif, dan berorientasi hasil sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026 adalah untuk menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tahun 2026, serta memberikan gambaran mengenai target dan capaian kinerja yang akan dilaksanakan oleh Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026.

Selain itu, dokumen ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan kinerja yang terarah, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan.

1.3 Sasaran

Sasaran Rencana Kinerja Tahunan Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026 adalah meningkatnya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sesuai standar mutu dan keamanan pangan, meningkatnya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha kelautan dan perikanan, meningkatnya kualitas pelayanan sertifikasi dan pengujian laboratorium, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu dan keamanan pangan, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung peningkatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan serta pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

BAB II RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 disusun secara komprehensif dengan memperhatikan evaluasi capaian pembangunan periode sebelumnya, analisis potensi dan permasalahan sektor kelautan dan perikanan, serta perkembangan lingkungan strategis nasional dan global sehingga menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Palembang memiliki peran strategis dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui penguatan penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Good Manufacturing Practices (GMP) guna menjamin kualitas mutu produk perikanan budi daya yang memenuhi standar keamanan pangan (food safety standard). Selain itu, Stasiun PPMHKP Palembang juga berperan dalam meningkatkan keberterimaan produk perikanan di pasar domestik dan global melalui harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta penanganan kasus mutu, menguatkan layanan inspeksi dan pengujian mutu perikanan dari hulu hingga hilir, serta menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan budi daya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang selaras dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta mendukung pencapaian pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu, Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan, maka visi pembangunan BPPMHKP adalah terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang unggul untuk menjamin keamanan, kualitas, keberlanjutan, dan daya saing hasil kelautan dan perikanan menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045, serta menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

2.2 Tujuan Strategis

Tujuan strategis Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Palembang adalah mewujudkan sistem pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang efektif, profesional, dan berkelanjutan melalui peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, penguatan layanan inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengujian laboratorium, serta penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Good Manufacturing Practices (GMP) guna menjamin keamanan pangan, meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk perikanan di pasar domestik maupun internasional, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

2.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun arah kebijakan BPPMHKP meliputi:

- Penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir sesuai standar nasional dan internasional.
- Peningkatan penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), Good Manufacturing Practices (GMP), dan Standard Sanitation Operating Procedure (SSOP) pada unit usaha kelautan dan perikanan.
- Peningkatan keberterimaan dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional.
- Penguatan layanan inspeksi, sertifikasi, surveilans, monitoring, dan pengujian laboratorium mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
- Penguatan sarana, prasarana, dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, profesional, dan akuntabel berbasis digital.

2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

2.4.1 Sasaran Strategiis

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan seiring dengan implementasi Kinerja berdasarkan *Balanced Scorecard* (BSC) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan BPPMHKP tersebut dibagi dalam tiga prespektif antara lain :

1. Kegiatan Pengendalian Mutu yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan , dengan indikator Kinerja yaitu :
 - a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (%)
 - b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (%)
 - c. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)
2. Kegiatan Sistem Jaminan Mutu yaitu Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai , dengan indikator kinerja yaitu :
 - a. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)

3. Kegiatan Dukungan manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan, dengan indikator Kinerja yaitu :
- a. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (Indeks)
 - b. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)
 - c. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)
 - d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang(Persen)
 - e. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)
 - f. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)
 - g. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)
 - h. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Indeks)

2.4.2 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan Stasiun PPMHKP Palembang Tahun Anggaran 2026. . Adapun Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Palembang tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Palembang	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Indeks)	3.5

Dalam mewujudkan target indikator Kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan Kinerja pusat, UPT dan Dekonstrasi. Adapun kegiatan dalam program pengembangan Stasiun PPMHKP Palembang sebagai berikut :

1. Pengendalian dan Pengawasan Mutu
2. pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan
3. Dukungan Manajemen

Dalam mewujudkan target Indikator Kinerja Utama Tahun 2026, Stasiun PPMHKP Palembang melaksanakan berbagai kegiatan yang didukung oleh satuan kerja pusat, UPT, dan dekonsentrasi. Kegiatan tersebut meliputi pengendalian dan pengawasan mutu, pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, serta dukungan manajemen. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai standar yang berlaku.

Sasaran kegiatan Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026 meliputi terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. Sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja seperti persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer dan pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, nilai pengawasan mutu hasil perikanan, serta implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Selain itu, Stasiun PPMHKP Palembang juga berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel melalui peningkatan profesionalitas ASN, pembangunan integritas, penguatan SAKIP, optimalisasi pelaksanaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut diukur melalui beberapa indikator, antara lain Indeks Profesionalitas ASN, Nilai Pembangunan Integritas, IKPA, NKPA, persentase tindak lanjut hasil pengawasan, persentase pengumuman RUP pada SIRUP, dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

2.4.3 Rencana Kinerja dan Anggaran Stasiun PPMHKP Palembang

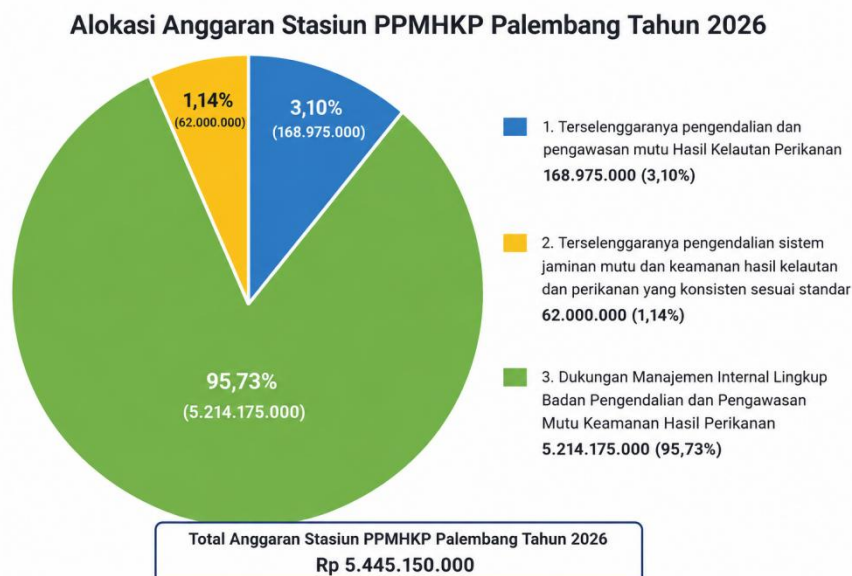
Rencana kinerja dan anggaran Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi anggaran Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026 sebesar Rp5.445.150.000 difokuskan pada pelaksanaan program prioritas dan inovatif.

Adapun alokasi anggaran per kegiatan adalah sebagai berikut:

- ✓ Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan dialokasikan sebesar Rp168.975.000 atau 3,10%
- ✓ Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan dialokasikan sebesar Rp62.000.000 atau 1,14%
- ✓ Dukungan Manajemen Internal dialokasikan sebesar Rp5.214.175.000 atau 95,73%

Strategi kebijakan anggaran dilakukan melalui peninjauan kembali terhadap kegiatan prioritas agar penggunaan anggaran dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Adapun alokasi anggaran per kegiatan pada program Stasiun PPMHKP Palembang disajikan pada Grafik 1 dan Grafik 2 sebagai berikut::

Grafik 1. Alokasi Anggaran Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026



Sedangkan rincian masing-masing kegiatan dituangkan dalam Rincian Output (RO) kegiatan pada Stasiun PPMHKP Palembang, terdiri dari :

1. Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi Rp.56.125.000
2. Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi Rp.93.850.000
3. Hasil perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya Rp.8.000.000
4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rp.5.000.000
5. Unit produksi primer yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Rp.6.000.000
6. Rekomendasi kebijakan Parameter uji terakreditasi di laboraotrium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan Rp.35.000.000
7. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium Rp.27.000.000
8. Layanan Umum Rp.176.480.000
9. Layanan Perkantoran Rp.5.037.695.000
10. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp.930.017.000

Grafik 2. Alokasi Anggaran Stasiun PPMHKP Palembang per jenis belanja



Total rencana alokasi anggaran Stasiun PPMHKP Palembang pada tahun 2026 sebesar Rp.5.445.150.000,-. Alokasi anggaran tersebut berdasarkan jenis belanja terdiri dari :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.107.678.000,- atau sebesar 75,44 %
2. Belanja Barang sebesar Rp.1.337.472.000,- atau sebesar 24,56 %

BAB III

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pengendalian dan pengawasan mutu serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Program Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 pada Stasiun PPMHKP Palembang diimplementasikan dalam rangka penerapan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan program tersebut selaras dengan arah kebijakan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 yang menitikberatkan pada pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan berbasis ekonomi biru, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan berorientasi hasil, Stasiun PPMHKP Palembang diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional, khususnya dalam menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pasar, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 sebagaimana arah pembangunan nasional dalam RPJPN dan Renstra KKP 2025-2029. Pelaksanaan program tersebut ditujukan untuk mewujudkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan secara efektif dan berkelanjutan.
2. Terselenggaranya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai ketentuan.
3. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

4. Terwujudnya aparatur sipil negara di lingkungan Stasiun PPMHKP Palembang yang kompeten, profesional, dan berintegritas.
5. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Terciptanya pengelolaan program dan anggaran yang tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.
7. Tersedianya dukungan manajemen dan administrasi yang optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
8. Terwujudnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dengan seluruh pemangku kepentingan.
9. Mendukung tercapainya visi dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026.

Total rencana alokasi anggaran Stasiun PPMHKP Palembang pada tahun 2026 sebesar Rp.5.445.150.000,-. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.107.678.000,- atau sebesar 75,44 %
2. Belanja Barang sebesar Rp.1.337.472.000,- atau sebesar 24,56 %

Adapun alokasi anggaran per kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan dialokasikan sebesar Rp168.975.000 atau 3,10%
- Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan dialokasikan sebesar Rp62.000.000 atau 1,14%
- Dukungan Manajemen Internal dialokasikan sebesar Rp5.214.175.000 atau 95,73%

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2026 ini, diharapkan tercipta keselarasan dan keterpaduan antara proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan pada Stasiun PPMHKP Palembang. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta didukung koordinasi dan sinergi seluruh pihak, diharapkan Stasiun PPMHKP Palembang mampu meningkatkan kualitas pengendalian dan pengawasan mutu serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Selain itu, Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan secara optimal.

Dengan demikian, seluruh pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Stasiun PPMHKP Palembang diharapkan dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.